



**PROSIDING**  
**Konferensi Nasional**  
**Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia**

**Penguatan Demokrasi Dalam Politik Identitas Dan Populisme di Indonesia**

**Imron**

Universitas Kader Bangsa  
imronputra629@gmail.com

**Sri Yuliana**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkajene  
Sriyuliana2019@gmail.com

**Virna Dewi**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkajene  
virnadewi80@gmail.com

**Anis Rindiani**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkajene  
anissamsung26@gmail.com

**Abstrak**

Berbagai kalangan menilai populisme dengan politik identitas memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam memperkuat demokrasi, dan demokrasi dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di satu sisi, politik kerakyatan seolah membangkitkan semangat rakyat yang tertindas atau tertindas oleh rezim otoriter orde baru. Di sisi lain, di sisi lain, gaya politik ini terjebak oleh suara mayoritas, dan orang-orang ini seolah-olah menindas minoritas pada saat yang bersamaan. Dalam kajian ini, penulis akan membahas mekanisme penguatan demokrasi politik dan identitas kerakyatan di Indonesia, serta kendala penguatan politik demokrasi dan populisme di Indonesia. Jenis dan sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka atau tinjauan pustaka, dokumen-dokumen tersebut diperoleh dengan cara mereview buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, artikel di internet, jurnal hukum, majalah, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Library Research Association mengumpulkan data dan informasi berdasarkan bacaan dan telaah buku, majalah, artikel, terbitan berkala, tulisan, serta peraturan perundang-undangan tentang isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI dan DPD RI) perlu mengundang tokoh masyarakat dari

semua tokoh politik dan agama agar mereka semua bersatu dan memberikan contoh yang baik agar mereka sadar akan hal itu menurutnya. Kesadaran negara membangun kembali persatuan. Negara berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kendala untuk memperkuat demokrasi adalah pemerintah terlalu cuek dengan heterogenitas masyarakat, dalam heterogenitas ini, saat berlangsungnya pemilu dan partai demokrasi lainnya, menciptakan "jurang pemisah" antar masyarakat. Hal ini sangat berbahaya bila diterapkan di Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, agama, ras dan kepercayaan.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Politik Identitas, Populisme

### **Pendahuluan**

Dalam perkembangannya, demokrasi saat ini memasuki tahap representasi politik yang maju. Pemilihan umum dipandang sebagai sarana partisipasi politik. Pemilihan umum atau demokrasi prosedural ini merupakan perwujudan dari konsep pemerintahan yang dianut oleh rakyat, rakyat dan rakyat. Pemilu merupakan prosedur kelembagaan dan praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dapat membentuk pemerintahan yang representatif. Menurut Robert Dahl, inilah cita-cita dan visi terbesar dari pemerintahan demokrasi modern. Lev menggambarkan demokrasi sebagai "kesombongan fiktif", yang berarti demokrasi adalah sistem pemilu yang representatif dengan tingkat kepraktisan dan potensi partisipasi yang tinggi (Kingsbury, 2007).

Saat ini, demokrasi tidak bisa benar-benar eksis sebagai pemerintahan oleh rakyat, dan rakyat harus menunjuk wakil-wakilnya untuk mengurus negara. Nilai-nilai demokrasi yang terkait dengan kepentingan rakyat tidak dapat dihilangkan dalam sistem demokrasi. Partai perwakilan yang dipilih oleh masyarakat harus benar-benar mewakili masyarakat dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Schumpeter, yang dikutip oleh Kingsbury, mengartikan demokrasi sebagai persaingan terbuka antara semua pemimpin politik, peran masyarakat adalah memberikan legitimasi kepada seseorang atau sekelompok orang yang akan menjadi penguasa (Kingsbury, 2007). Demokrasi adalah model politik, mekanisme pemilihan pemimpin politik dan kemampuan memilih pemimpin politik dalam pemilu. Ia percaya bahwa metode demokrasi adalah tatanan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik, di mana seseorang memperoleh suara melalui perjuangan kompetitif dan dengan demikian memiliki hak untuk membuat keputusan. Demokrasi ibarat sebuah "pasar", yang merupakan mekanisme kelembagaan yang dapat mengecualikan yang paling lemah dan memberikan dukungan kepada yang paling mampu dalam persaingan memperebutkan suara dan kekuasaan (Held, 2007).

Seperti biasa pada perlombaan atau perlombaan lainnya, dalam proses demokrasi peserta juga harus dipersiapkan untuk menjadi yang paling layak memenangkan perlombaan. Dalam kasus pemilihan umum ini, peserta pemilihan umum harus dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai cara agar dapat mengikuti pemilihan, atau setidaknya tampil layak untuk dipilih. Pemilihan umum pada akhirnya dimaknai sebagai proses demokrasi untuk menentukan politisi-politisi yang menduduki jabatan pemerintahan, yang kemudian akan berperan penting dalam menentukan arah pemerintahan. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi merupakan elemen kunci dari demokrasi itu sendiri. Tanpa pemilihan umum yang bebas, adil dan teratur,

pemerintah tidak dapat benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilu merupakan mekanisme politik yang mengungkapkan keinginan dan kepentingan warga negara. Setidaknya ada empat fungsi penting pemilu: legitimasi politik, pembentukan perwakilan politik, sirkulasi elit politik, dan pendidikan politik (Hikam, 1999). Oleh karena itu, Pemilu selama ini merupakan salah satu sistem yang paling representatif dalam penyelenggaraan proses demokrasi, oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa pemilu. Namun makna pemilu sebagai sirkulasi elit justru menegaskan jawaban bahwa demokrasi sebenarnya sejalan dengan penanaman elitisme.

Perubahan pada skala nasional dan global telah menyebabkan ledakan pertumbuhan karakteristik anti-sistem; pertama, orang memiliki perasaan terasing dari penguasa, dan tanggapan mereka terhadap politik rumit dan ambigu. Kedua, mereka umumnya menolak untuk menerima keputusan dari kelompok yang berkuasa, apakah mereka dipilih secara demokratis atau tidak, karena elit penguasa sering dianggap melebihi harapan rakyat biasa, dan demokrasi harus membawa mereka keinginan untuk meningkatkan taraf demokrasi, keterwakilan dan pengaruh social (Haynes, 2000). Melihat hal tersebut, para aktor demokrasi kini lebih aktif di berbagai bidang politik, dan cenderung mengambil jalan pintas populis, dengan memilih menjalin hubungan langsung antara tokoh masyarakat dan elit di satu sisi, dan masyarakat di sisi lain. keterwakilan. Mengingat kemampuan politik aktor alternatif, data Demos menunjukkan bahwa aktor seringkali memilih jalan pintas populis dalam sistem politik. Secara umum, orang-orang dimobilisasi melalui klientisme dan populisme (Haynes, 2000). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang: bagaimana mekanisme penguatan demokrasi dalam politik dan identitas populisme di Indonesia? Serta bagaimana kendala penguatan demokrasi dalam politik identitas dan populisme di Indonesia?

### **Kajian Literatur**

Survey Demos (Pribadi, 2003) menunjukkan bahwa peran demokrasi atau peran alternatif sekarang lebih aktif di arena politik, dan cenderung mengambil jalan pintas populis. Di satu sisi, mereka memilih untuk menjalin hubungan langsung antara tokoh masyarakat dan elit, dan seterusnya. yang lain, mereka menghindari membangun hubungan dengan masyarakat, kontak. Pilihan untuk berpartisipasi aktif dalam politik juga terkait dengan peningkatan kapasitas aktor alternatif, yang sejalan dengan perubahan posisi relatif terhadap instrumen demokrasi, seperti pemilu yang bebas dan adil, keterwakilan yang baik, partisipasi langsung, dan partisipasi politik lainnya (Samadhi, Willy, & Waraouw, 2009). Pemilu demokratis memberikan peluang bagi para pemimpin populis yang lahir dari ketegangan dan tuntutan. Menggunakan pemilu sebagai alat demokrasi sama dengan memposisikan pemilu sebagai fungsi asli dari pembentukan pemerintahan perwakilan. Nilai demokrasi dari pemilu bergantung pada tingkat persaingan.

Populisme erat kaitannya dengan gaya kepemimpinan. Secara konseptual, populisme memiliki banyak arti. Singkatnya, populisme diartikan sebagai suara pidato politik, yang meyakini bahwa kebajikan dan legitimasi politik ada pada rakyat. Oleh karena itu, populisme menempatkan rakyat di atas segalanya. Pemahaman ini didasarkan pada gagasan untuk

mengutamakan kepentingan rakyat. Karenanya, populisme mendapat simpati dari masyarakat. Richard Hofstadter berpendapat bahwa rencana yang dibangun oleh populisme dapat membangun masyarakat.

Pandangan lain, populisme adalah ideologi yang "kurus", yang membagi masyarakat menjadi polarisasi yang homogen dan berlawanan, yaitu orang-orang baik yang berurusan dengan elit korup. Populisme memisahkan orang baik dari orang jahat (elit korup). Orang berpikir bahwa orang yang baik dapat membantu, membantu dan menggunakan posisinya untuk melayani masyarakat. Di sisi lain, orang jahat tidak bisa berdiri dengan orang-orang, tetapi menggunakan posisinya untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Karenanya, populisme biasanya dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik yang menggunakan pesonanya untuk menarik perhatian publik. Kemudian mereka mengangkat isu penting bela hak orang-orang kecil yang menyiksa masyarakat. Perjuangan untuk hak-hak rakyat jelata dan perjuangan untuk peningkatan martabat manusia telah menjadikan politik kerakyatan mendapat tempat di hati rakyat. Oleh karena itu, populisme dianggap sebagai gaya politik yang memuat berbagai fenomena yang dapat diungkap. Setidaknya ada empat gaya populis. Pertama, kediktatoran populis mencakup situasi di mana tokoh karismatik melampaui tokoh politik tradisional dan memperoleh kekuasaan inkonstitusional dengan menyediakan "makanan dan hiburan" kepada orang-orang.

Kedua, demokrasi kerakyatan adalah musuh yang mewakili dan selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan sebanyak mungkin orang-orang. Fitur sistem uniknya adalah Legislasi disahkan melalui referendum Dewan perwakilan; inisiatif umum, di mana Para pemilih dapat melewati majelis, Usulkan undang-undang yang tertunda Memberikan suara dalam referendum; Ada juga lembaga recall, yaitu perwakilan rakyat bisa Dipaksa oleh para pemilihnya yang tidak puas Pemilu tambahan sebelumnya Akhir masa kerja.

Ketiga, populisme reaksioner menggambarkan politisi berurusan dengan prasangka massa demokrasi untuk menghadapi pandangan yang dianggap mengungguli elit politik. Dalam hal ini, politisi yang paling mungkin dituduh populisme adalah melalui perkelahian dengan permusuhan rasial atau pandangan sayap kanan tentang ketertiban umum.

Keempat, populisme politisi adalah politisi yang menghindari janji ideologis dan mengklaim berbicara atas nama seluruh rakyat daripada faksi tertentu, dan yang mengklaim memiliki sedikit prinsip, kebijakan yang fleksibel, dan siap menerima semua kontestan. Oleh karena itu, populisme adalah ekspresi dari keinginan universal.

Kebijakan kerakyatan sangat erat kaitannya dengan politik pertahanan nasional para pemimpin daerah. Pembelaan politik yang kontroversial adalah upaya kepala daerah untuk menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan dukungan politik agar tetap berkuasa. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan pemimpin. Salah satu tujuan seorang pemimpin adalah mempertahankan kekuatannya. Untuk mempertahankan kekuatannya sendiri, perlu disebar dan dipecah-pecah program kerakyatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Temuan *Power, Welfare and Democracy* (PWD) menggambarkan program populis yang melibatkan kepentingan publik.

Kebijakan kerakyatan sangat bergantung pada upaya para pemimpin daerah tanpa dukungan ormas dan partai politik. Kuncinya adalah dengan sengaja memilih kebijakan populis sebagai bentuk pembatas pada masyarakat. Persatuan ini terungkap sejak kampanye, hingga ia menjadi pejabat. Seperti yang dikatakan Amalinda, para pemimpin daerah cenderung menggunakan isu populisme saat kampanye pemilu atau saat berkuasa. Misalnya, mereka cenderung terus menggalakkan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan gratis.

Asuransi kesehatan gratis dan pendidikan gratis merupakan dua kebijakan kerakyatan yang paling dibutuhkan oleh petani, buruh, nelayan, dan masyarakat miskin perkotaan karena merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, para pemimpin daerah bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, di balik kebijakan kerakyatan, pemimpin daerah memperoleh manfaat melalui manfaat dan bentuk politik; pertama, perlu ditegaskan bahwa pemimpin memiliki kesatuan karakter pribadi, perkataan dan perbuatan. Kata-kata, perbuatan, perilaku para pemimpin diuji. Karena itu, ketika mereka menjabat, mereka akan menindaklanjuti apa yang menjadi gerakan politik mereka. Biasanya, program kerakyatan yang diberikan oleh pemimpin daerah terkait dengan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

Kedua, bayangkan kekuasaan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat merupakan pilihan yang masuk akal bagi para pemimpin untuk membangun kekuasaan di tingkat lokal. Seperti yang dikatakan Samuel Huntington, memperluas kemakmuran di seluruh wilayah adalah bagian dari membangun kekuatan dan memperluas dampaknya pada masyarakat. Oleh karena itu, distribusi manfaat ke seluruh daerah menjadi sangat penting untuk memperkuat kekuatan pemimpin. Dengan kata lain, kekuasaan dicadangkan untuk kebaikan bersama.

Ketiga, kebijakan kerakyatan akan menjalin hubungan yang lebih erat antara pemimpin dan masyarakat. Hubungan erat antara pemimpin dan masyarakat dibangun melalui kebijakan yang pro masyarakat. Pemimpin yang baik akan selalu merespon kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan dan memberikan manfaat. Dengan cara ini, loyalitas masyarakat akan terjalin dengan kokoh. Loyalitas komunitas dibangun melalui keintiman, perlindungan dan kesejahteraan. Artinya, pemimpin diakui karena memberikan teladan nyata kepada masyarakat.

Keempat, kebijakan kerakyatan akan mendapatkan legitimasi masyarakat. Legitimasi akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada para pemimpin, tidak hanya untuk memperluas kesejahteraan dan pelayanan publik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas berarti memperkuat pengawasan hak pakai. Wewenang merupakan kekuatan yang memiliki legitimasi dalam menjaga kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik yang baik.

Populisme telah memberi warna baru bagi dinamika politik dan kekuasaan lokal. Untuk menuntut pemimpin lokal mempertahankan kekuasaan, mereka harus dengan bijak memulai program populis dan mengontrol kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemimpin populis untuk mempromosikan program populis dan mengontrol kesejahteraan merupakan strategi untuk meningkatkan kekuatannya. Artinya menumbuhkan kepribadian yang kuat di tingkat lokal dan sampai batas tertentu keberanian untuk melawan partai politik dan DPRD atas nama kepentingan

rakyat. Pemimpin populis telah menjadi senjata melawan musuh politik mereka atas nama "rakyat" dan "kepentingan rakyat".

Populisme telah menambah warna baru pada dinamika politik dan kekuasaan di tingkat lokal. Untuk menuntut pemimpin lokal mempertahankan kekuasaan, mereka harus memulai rencana dan mengontrol kesejahteraan masyarakat dengan bijak. Kemampuan pemimpin populis untuk mempromosikan program populis dan mengontrol kesejahteraan merupakan strategi untuk meningkatkan kekuatannya. Artinya membangun kepribadian yang kuat di tingkat lokal dan sampai batas tertentu berani melawan partai politik dan DPRD atas nama kepentingan rakyat. Pemimpin populis telah menjadi senjata melawan musuh politik mereka atas nama "rakyat" dan "kepentingan rakyat".

Kedua, karena lemahnya partai, mungkin muncul pemimpin populis. Pemimpin yang dikenal dengan inovasi dan reformasi tata pemerintahan, sehingga program kerakyatan berupa pelayanan publik dan kesejahteraan adalah pemimpin yang lahir di luar rahim partai politik. Nurdin Abdulla dari Bantaeng berlatar belakang akademis dan berstatus penguasa, Ridwan Kamil berlatar belakang aktivis sosial muda dan arsitek tata kota, Tri Risma seorang birokrat, dan Jokowi dari Solo dan DKI Jakarta adalah seorang pengusaha. Karena mereka tidak lahir dari rahim partai politik, maka mereka membesarkan dirinya melebihi partai politik. Implikasinya adalah partai politik hanya menjadi instrumen bagi mereka untuk meraih kekuasaan.

Jika situasi ini dibiarkan terus menerus, marginalisasi peran partai akan berkurang. Bagi eksistensi parpol sebagai tempat kelahiran pembaruan kepemimpinan, fenomena ini niscaya sangat berbahaya. Selama sebuah partai tidak bisa melahirkan kader atau pemimpin, tentu saja pemimpin populis akan memanfaatkan kelemahan partai.

Ketiga, pemimpin populis akan menghadapi situasi di mana rencana mereka tidak berkelanjutan. Ini terjadi karena proyek populis biasanya dibuat berdasarkan keinginan pemimpinnya sebagai tanggapan atas keinginan masyarakat. Proyek populis biasanya berjangka pendek. Oleh karena itu, ketika bupati berganti, semua proyek kerakyatan otomatis akan segera runtuh. Inilah kelemahan terbesar para pemimpin populis karena mereka sudah lama tidak melembagakan rencana populis.

Semakin kompetitif pemilu, semakin demokratis jadinya. Untuk menjawab bagaimana sistem demokrasi mengatasi ketegangan politik antara politik eksklusif dan politik inklusif, selama ini telah melahirkan berbagai model kelembagaan dalam politik demokrasi. Bagaimana menggunakan kekuatan dan kelemahan sendiri dengan cara atau strategi tersendiri, bagaimana mengatasi eksklusi sosial dalam kerja logika kesetaraan, terutama dalam pembentukan sistem politik kerakyatan atau demokrasi kerakyatan melalui strategi metafisik untuk mengimplementasikannya (Laclau, 2005).

Sistem pemilihan umum yang digunakan oleh suatu negara berdampak besar pada eksistensi populisme itu sendiri. Seorang tokoh harus menentukan lingkaran mana dia harus populer untuk memenangkan pemilihan. Itu hanya bisa ditentukan saat menentukan sistem pemilu mana yang akan digunakan. Setelah menyadari kesadaran para pemimpin populis untuk bersaing melalui mekanisme elektoral, mereka menyadari kesadaran membaca peta sosial politik yang penuh dengan aktor-aktor besar dan elit lama yang tidak membawa perubahan. Apalagi dalam

pemilihan pemimpin politik di tingkat pemerintahan seperti presiden, gubernur, bupati, atau pejabat kepala sekolah, mudah untuk membedakan pemimpin populis mana yang merupakan aktor pengganti bagi elit lama. Berbekal modal dengan kebutuhan khusus, strategi yang digunakan para pemimpin kerakyatan untuk memenangkan pemilu tentu berbeda dengan pelaku utama lainnya, yakni melalui olahraga untuk merepresentasikan nilai-nilai demokrasi penjualan rakyat dan arah pembangunan.

### **Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menentukan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamoedji, 2013).

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan (jika kita menggabungkan semua batasan hukum dan semua aspek Terhubung bersama). Kelemahan faktor hukum dan non hukum, serta analisis berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik hukum empiris atas permasalahan di atas.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data mentah merupakan sumber data yang tidak diperoleh melalui media perantara atau diperoleh langsung dari sumbernya. Data mentah dapat berupa opini, observasi, peristiwa atau aktivitas, dan hasil tes. Data sekunder adalah data dari studi pustaka, dimana bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan data dari buku, literatur dan ahli hukum, jurnal hukum atau sumber lain yang terkait dengan penelitian untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Mekanisme Penguatan Demokrasi Dalam Politik Dan Identitas Populisme Di Indonesia**

Demokrasi tidaklah lepas dari politik dan kekuasaan. Kekuatan politik adalah kemampuan untuk membujuk, membujuk, memaksa, mengubah, mempengaruhi, memodifikasi atau memanipulasi tindakan, keyakinan. atau nilai yang dimiliki individu lain. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan politik adalah tentang bagaimana mengubah arah tujuan. Semua kekuasaan adalah politis karena memiliki kecenderungan luas, dimana dampaknya dapat dirasakan dan dilihat. Oleh karenanya terdapat perbedaan pandangan mengenai struktur kuasa, ada yang berpandangan bahwa kuasa politik hanya ada dan terdapat dalam struktur lembaga negara ada juga yang berpendapat bahwa kuasa ada dalam setiap lini kehidupan manusia. Kekuasaan itu seperti pedang bermata dua, ada dimana saja, selama ada kehidupan sosial manusia, orang akan percaya bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan, motivasi dan rasa hormat. Bahwa kuasa bisa bersifat langsung maupun tidak langsung tergantung pada relasi kuasa yang dibentuk. Semakin besar level relasi kuasa yang dibentuk maka akan semakin besar pula

pengaruh yang dihasilkan untuk membuat perubahan terhadap lingkungan atau konten yang diinginkan (Mills, 1956).

Menurut Beetham, dengan karakter populisme ini diakui, maka yang harus diapresiasi adalah kemunculan gagasan mengenai populisme, gagasan yang mengatasnamakan rakyat diatas segalanya untuk menuju negara kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan populisme sebenarnya bisa menjadi gagasan yang baik yang diyakini dan dimiliki oleh para aktor politik untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih mensejahterakan. Artinya gagasan populisme bukan hanya milik aktor alternatif, namun gagasan ini bisa saja mempengaruhi elit-elit lama.

Kristalisasi nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena nilai Pancasila pada dasarnya merupakan inti dari nilai-nilai yang dianut dalam sistem kebudayaan Indonesia ini. Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada individualitas bangsa, sehingga menjadi diterima sebagai aturan Dasar negara tempat tinggal konstitusi. Pancasila berperan sebagai mediator dan moderator sikap dan perilaku setiap bangsa Indonesia dan Tuhan Yang Maha Esa (Sila-I), sebangsa (Sila II) dan ibu pertiwi serta negara Indonesia yang berkekuatan nasional (Sila-III) dan negara sebagai satu kesatuan (Sila-V) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah bahwa meskipun ekspresinya sedikit berbeda, namun terdapat pada tiga bagian UUD yaitu Pembukaan UUD '45, Pembukaan UUD RIS dan Pembukaan UUD 1945 (1950). Pancasila masih ada di dalamnya. Pancasila senantiasa ditegaskan dalam kehidupan ketatanegaraan, dan menjadi acuan universal ketika terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap ekosistem nasional kita. Hal ini merupakan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Pancasila selalu menjadi sumber penguasaan bangsa Indonesia. Kehormatan bangsa Indonesia yang diharapkan yaitu landasan negara karena telah mengakar di hati rakyat dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

### **Kendala Penguatan Demokrasi Dalam Politik Identitas Dan Populisme di Indonesia**

Berubahnya populisme ini yaitu pelanggaran dominasi oligarki yang semakin mengakar kuat disetiap lini kehidupan politik Indonesia, disamping absennya kekuatan politik progresif emansipatoris sebagai kekuatan penyeimbang (Purwanto, 2015). Umumnya populisme dipandang sebagai kekuatan reformis untuk mengkonfrontasi pengaruh oligarki, tetapi pada kasus Indonesia kelompok oligarki menyesuaikan konteks sosial politik pemilih dengan mengadopsi populisme dan strategi mobilisasinya dalam mempertahankan status-quo nya baik ditataran struktural maupun elektoral. Wujud penyesuaian oligarkis tersebut dapat berupa konflik proksi yang melibatkan fraksi elit-elit politik atau nominasi sosok populer, kader atau non-kader, yang diterima luas diakar rumput, melalui konstruksi retorika populis dan narasi-narasi reformis dan revolusioner dengan mengeksploitasi aspek emosi pemilih sebagai prakondisi mobilisasi populis (Hadiz & Robbinson)

Pada konstelasi politik elektoral pemilu 2019, kita menyaksikan bagaimana upaya saling serang antar kedua paslon lebih fokus pada kelemahan personal dan basis pendukung kedua kandidat, tetapi sorotan terhadap permasalahan negara yang berpengaruh negatif terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, yang disebabkan langsung oleh korporasi-korporasi dari

jejaring oligarki pendukung mereka ([www.mongabay.com](http://www.mongabay.com), 2019) seakan bukan menjadi persoalan genting bangsa yang menjadi perhatian publik banyak dan tidak lebih penting dibandingkan peluang terpilihnya kandidat pilihan mereka dan kekhawatiran yang akan malapetaka yang akan terjadi jika kandidat rival terpilih. Konsekuensinya, instrumentalisasi populisme secara lentur dalam persaingan politik ini lebih banyak bergerak di ranah prosedural dalam sistem demokrasi, walaupun harus diakui bahwa prosedur merupakan komponen penting dari substansi demokrasi itu sendiri (Haryanto, 2019). Namun, terlihat bahwa cita-cita prinsipil yang substansial dari demokrasi itu justru terabaikan dalam dinamika kontestasi yang mana akhirnya stagnasi demokrasi Indonesia yang terjadi selama ini terus berlanjut. Bahkan kedua paslon memberikan peluang akan kemunculan kekuatan yang melemahkan demokrasi baik itu bagi sistem, tata kelola, maupun kultur demokrasi yang ada di Indonesia. Sikap abai terhadap potensi ancaman tersebut dilatarbelakangi oleh motif untuk mengamankan posisi politik dan elektabilitas yang diuntungkan. Sebaliknya, publik belum melihat bagaimana prospek bagi pendalaman demokrasi, penguatan institusi, prinsip *rule of laws* dan keadilan itu terejawantahkan dalam kebijakan yang akan ditawarkan (Trijono, 2011).

Kendala penguatan demokrasi ialah pemerintah terlalu mengabaikan heterogenitas masyarakat dimana ketika terjadi pesta demokrasi seperti pemilu itu dilaksanakan, dan membuat jurang pemisah antar masyarakat. Hal tersebut sangat berbahaya bila diterapkan di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan. Implikasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa populisme cenderung mengarahkan masyarakat pada pengkultusan sosok kandidat secara dramatis. Hal ini berefek pada tumpulnya daya nalar masyarakat untuk mengkritisi celah-celah produk dan proses pembuatan keputusan yang berpotensi negatif bagi kehidupan berpolitik. Tentunya situasi demikian tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia karena akan menyebabkan kemandegan proses *check and balance*, serta terbentuknya rasa ketidakpekaan warga negara terhadap kondisi ketidakadilan dan ketertindasan rakyat yang tercipta dari kebijakan yang ditawarkan pemerintahan populis ini. Dampak yang lebih berbahaya lagi yaitu terciptanya sikap antipati atau permusuhan kepada sesama warganegara yang berbeda pilihan dan pandangan politik dengan mengkonstruksikan narasi rawan seperti *us versus them* dalam polarisasi sosial ini.

### **Kesimpulan**

Kristalisasi nilai Pancasila sangat bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena pada dasarnya nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai yang dipercayai di tengah masyarakat Indonesia yang berbudaya ini, Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada individualitas bangsa, sehingga diterima sebagai landasan negara yang mengatur kehidupan pemerintahan negara.

Kendala penguatan demokrasi ialah pemerintah terlalu mengabaikan heterogenitas masyarakat dimana ketika terjadi pesta demokrasi seperti pemilu itu dilaksanakan, dan membuat “jurang pemisah” antar masyarakat. Hal tersebut sangat berbahaya bila diterapkan di Indonesia yang terdiri dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan. Implikasi dari

kondisi ini menunjukkan bahwa populisme cenderung mengarahkan masyarakat pada pengkultusan sosok kandidat secara dramatis. Hal ini berefek pada tumpulnya daya nalar masyarakat untuk mengkritisi celah-celah produk dan proses pembuatan keputusan yang berpotensi negatif bagi kehidupan berpolitik.

### Referensi

- Alfian, M. Alfian. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Strukturalisasi (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haynes, Jeff. (2000). *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Held, David. (2007). *Models of Democracy*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Hikam, Muhammad A. S. 1999. *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Kingsbury, Damien. (2007). *Political Development*. New York: Routledge.
- Laclau, Ernseto. (2005). *On Populist Reason*. London–New York: Verso
- Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*. New York City: Oxford University Press.
- Samadhi, Willy Purna dan Warouw, Nicholas. (2009). *Demokrasi di Atas Pasir*. Jakarta-Yogyakarta: PCD Press dan Demos.
- Soekanto, S., & Mamudji, S., (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhtadi, B. (2013). Populisme; Madu Atau Racun Bagi Demokrasi? *Majalah Indonesia 2014*, No. 3, Vol. 1, 2013. Hal 94.
- Haryanto. (2009). Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 3, hal 131- 148.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Pemerintahan Volume 03*, Nomor 01.
- Pribadi, A. (2013). Menjernihkan Politik Populisme. *Majalah Indonesia 2014*. Vol 1, No. 8. 2013.
- Triyono, L. (2011). Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 15, No. 2, hal 93-110.
- Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan Dan Ruang Hidup Warga,” *Mongabay Environmental News*, April 16, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/>

[sexy-killer-ketika-industri-batubara-hancurkan-lingkungan- dan-ruang-hidup-warga/](#), diakses pada 12 Maret 2021

